

## **BAB III**

### **KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)**

#### 3.1 Program KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan skema pembiayaan/kredit yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak (*feasible*) namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan perbankan (*bankable*). Tujuan akhir dari Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. UMKM yang telah mendapatkan fasilitas kredit melalui program KUR, diharapkan nantinya akan menjadi unit usaha yang mandiri, dan dapat mengakses kredit secara komersial.

Pelaku usaha UMKM dimaksud adalah UMKM menurut definisi UU. Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih sampai dengan Rp. 10 miliar atau memiliki penjualan satu tahun sampai dengan Rp. 50 miliar. Pada program KUR ini kredit dikhususkan untuk pelaku UMKM yang belum mengakses kredit perbankan (UMKM yang tidak mempunyai kredit) sehingga perbankan harus benar-benar mencari UMKM baru yang layak untuk dibiayai.

##### 3.1.1 Latar Belakang Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Cikal bakal lahirnya program KUR berawal dari terbitnya Paket Kebijakan Sektor Keuangan pada tahun 2006, dalam rangka pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKM.

Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM mencakup:

- a. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
- b. Pengembangan kewirausahaan
- c. Peningkatan pasar produk UMKM

- d. Reformasi regulasi UMKM
- e. Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKM.

Tindak lanjut dari usaha membantu akses permodalan bagi UMKM adalah, hasil Sidang Kabinet Terbatas yang diadakan tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Salah satu agenda keputusannya adalah, bahwa dalam rangka pengembangan usaha UMKM dan koperasi, pemerintah akan mendorong akses UMKM dan koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan Penjaminan. Sehingga UMKM dan koperasi yang selama ini mengalami kesulitan mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan karena terbatasnya agunan dapat diatasi. Upaya untuk mengembangkan dan meberdayakan UMKM selanjutnya dituangkan dalam Inpres No. 6 tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Salah satu langkah untuk meningkatkan akses sektor UMKM terhadap pembiayaan/kredit dari perbankan adalah melalui Program Kredit Usaha Rakyat.

Program KUR secara resmi di luncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 5 November 2007. Peluncuran KUR merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (yang diwakili oleh enam Departemen Teknis, yaitu Departemen Keuangan, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM), Lembaga Penjaminan (PT.Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha sekarang menjadi Perum Jamkrindo dan enam Bank Pelaksana KUR (Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri).

Pada program KUR, kredit yang disalurkan oleh perbankan murni berasal dari dana perbankan, yang telah dijamin oleh Lembaga Penjaminan Kredit. Berdasarkan ketentuan Program KUR, diberlakukan *risk sharing* antara lembaga penjaminan dengan perbankan, dimana jika kredit yang disalurkan macet, risiko ditanggung

bersama oleh perbankan dan lembaga penjaminan, yaitu dengan komposisi 30% oleh perbankan dan 70% oleh lembaga penjaminan. Sementara Pemerintah berkewajiban untuk membayarkan premi penjaminan sebesar 1,5% yang dialokasikan dari APBN.

Untuk meningkatkan kapasitas penjaminan dari lembaga penjaminan, maka pada tahun 2008, pemerintah telah menambahkan modal baru kepada PT.Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar Rp.14,5 triliun, dimana sebesar Rp. Rp.850 miliar untuk PT. Askrindo dan Rp.600 miliar sebagai tambahan modal untuk Perum Jamkrindo. Dengan target penjaminan yang diberikan (*gearing ratio*) sebesar 10 kali, dan diharapkan dapat menyalurkan KUR sebesar Rp. 14,5 trilun. Sementara, jumlah debitur atau pelaku UMKM yang memperoleh kredit ditargetkan sebanyak 650 ribu debitur. Pada tahun 2009, berdasarkan persetujuan dari DPR, telah dialokasikan tambahan modal bagi lembaga penjaminan sebesar Rp. 500 miliar, sehingga dengan *gearing rasio* sebesar 10 kali, maka target penyaluran KUR pada tahun bertambah sebesar Rp.5 triliun atau menjadi Rp.19,5 triliun.

### 3.1.2 Ketentuan dari Program KUR

Pokok-pokok ketentuan pelaksanaan Program KUR dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah, Perbankan, dan Lembaga Penjaminan tanggal 5 November 2007. Sementara terhadap teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Komite kebijakan.

1. Pokok-Pokok Kesepakatan (MoU) penjaminan kredit melalui KUR:
  - a. Tujuan dari Program KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan untuk memperluas kesempatan kerja.
  - b. Fasilitas penjaminan kredit diberikan kepada UMKM yang usahanya produktif yang layak namun belum *bankable*.
  - c. Nilai kredit maksimal Rp. 500 juta per debitur.
  - b. Bunga maksimal 16% per tahun (efektif), dan 24 % untuk linkage program dan KUR mikro (di bawah Rp. 500 juta).

- c. Pembagian risiko penjaminan: perusahaan penjaminan 70% dan bank pelaksana 30%.
  - d. Penilaian kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan bank pelaksana.
  - e. UMKM dan koperasi tidak dikenakan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), dan menjadi tanggungan pemerintah.
  - f. Pengawasan akan dilakukan oleh Komite Kebijakan
2. Addendum tambahan dari Ketentuan MoU KUR yang dikeluarkan oleh Komite Kebijakan tanggal 7 Mei 2008:
- a. Kredit/Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang dijamin adalah Kredit/Pembiayaan Baru dan atau diberikan kepada Debitur Baru dan bukan kepada Debitur yang sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil *Bank Indonesia Checking* pada saat permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan.
  - b. Kredit mikro di bawah Rp. 5 juta dengan suku bunga/bagi hasil maksimal sebesar/setara 24% efektif per-tahun.
  - c. Verivikasi terhadap kredit akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sebagai suatu bentuk tindakan preventif dan verivikasi dilakukan secara selektif.
3. Komite Kebijakan

Dalam rangka mengkoordinasikan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dibentuk Komite Kebijakan, berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No. KEP-05/M.EKON/01/2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi pada tanggal 31 Januari 2008.

Tugas dari Komite Kebijakan adalah:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, program, dan rencana kerja, serta langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- c. Menetapkan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- d. Melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

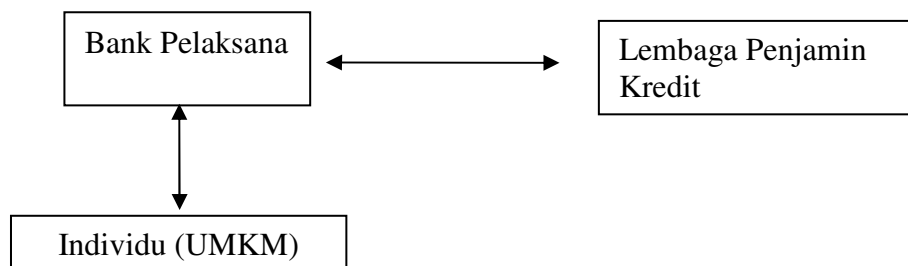
Hal-hal yang dikoordinasikan oleh Komite Kebijakan dengan instansi terkait adalah:

- a. Penyiapan UMKM dan Koperasi sesuai dengan kewenangan instansi pembina.
  - b. Kebijakan dan prioritas bidang usaha.
  - c. Pembinaan dan pendampingan UMKM dan koperasi.
  - d. Sosialisasi program dan koordinasi dengan daerah
  - e. Kebijakan penjaminan kredit.
4. Pola pembiayaan dari KUR

Pelaksanaan Program KUR oleh bank pelaksana dapat dilakukan melalui dua pola pembiayaan yaitu;

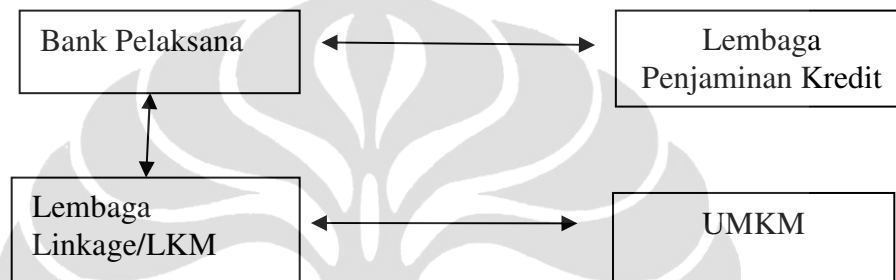
- a. Langsung kepada *end user* (UMKM), dimana penyaluran kredit KUR langsung dilakukan oleh bank pelaksana kepada debitur UMKM. Selanjutnya bank akan mengajukan permohonan penjaminan kepada lembaga penjaminan, dengan maksimal plafon jaminan sebesar 70% dari kredit yang diberikan.

**Gambar 7 : Skema Penyaluran KUR Langsung Kepada End User**



- b. Melalui *linkage* program dengan koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penyaluran KUR dilakukan oleh bank kepada koperasi atau LKM. Selanjutnya Koperasi dan LKM menyalurkan kredit kepada anggotanya. Bank pemberi kredit kemudian mengajukan penjaminan kepada Lembaga Penjaminan Kredit, dengan maksimal penjaminan sebesar 70% dari kredit yang disalurkan.

**Gambar 8: Skema penyaluran KUR melalui Pola Linkage Program.**



### 3.2 Perbedaan Program KUR dengan Program terdahulu

Sebelum diluncurkannya Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2007, pola pembiayaan untuk membantu pelaku usaha khususnya di sektor pertanian pernah dilakukan melalui Program Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Ketahanan Pangan. Kedua pola pembiayaan ini dilakukan dengan subsidi bunga. Namun sepanjang pelaksanaan program, terutama Program KUT menimbulkan banyak masalah, karena besarnya kredit macet dari program ini.

#### 3.2.1 Kredit Usaha Tani (KUT)

Kredit Usaha Tani (KUT) berlangsung semenjak tahun 1995 s.d 2000. KUT merupakan kredit modal kerja yang diberikan kepada petani/KUD untuk keperluan petani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi/palawija dan hortikultura. Program KUT di rancang dengan sistem subsidi bunga kepada petani, dengan jaminan berupa kelayakan usaha, dan bila perlu dapat dimintakan jaminan tambahan. Sumber dana KUT berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Dalam perkembangannya KUT telah beberapa kali mengalami perubahan aturan terhadap suku bunga. Awalnya suku bunga KUT ditetapkan sebesar 12% termasuk margin KUD 2%. Pada tahun 1998 melalui SK Menkeu No S-607/MK.017/1998 ditetapkan suku bunga KUT dari 14,5% menjadi 10,5%. (Pardede, 2002).

Berdasarkan perkembangan realisasi KUT, dari awal program berjalan baik, di tandai dengan rendahnya tunggakan KUT. Namun memasuki tahun 1997 hingga berakhirnya program KUT, terjadi lonjakan tunggakan sehingga kredit KUT kemudian di hentikan pada tahun 2000.

**Tabel: 3.1. Realisasi Penyaluran dan Tunggakan KUT**

Tahun Penyediaan (TP)	Realisasi KUT (Rp. Miliar)	Tunggakan KUT	Rasio realisasi/tunggakan
92/93	52,93	12,04	19,14
93/94	48,05	5,67	11,70
95	47,98	6,11	12,75
96	213,06	38,62	18,13
97	230,33	54,11	23,49
98	367,378	69,79	18,99
99	8.423,64	6.048,26	71,80
1999/2000	1.262,73	1.114,12	88,30

Sumber: Pardede, 2002

Program KUT dengan pola subsidi bunga dengan sumber dana berasal dari dana KLBI, dikembangkan dengan pola subsidi bunga. Namun seiring membengkaknya tunggakan KUT, maka sejak tahun 1998 diberlakukan risk sharing antara pemerintah, Bank Indonesia, dan bank pelaksana terhadap tunggakan KUT. Besarnya risk sharing masing-masing 52,25% oleh pemerintah, 42,75% oleh Bank Indonesia dan 5% oleh perbankan.

Pola kredit dengan pembagian risk sharing ini kemudian di adopsi ke dalam Program KUR tahun 2007, namun dengan mengikutsertakan Lembaga Penjaminan, dan pemerintah hanya sebagai penyedia premi Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

### 3.2.2 Kredit Ketahanan Pangan (KKP)

KKP di luncurkan pada tahun 2000, sebagai pengganti dari KUT, namun dilakukan perbaikan dari program KUT. Seiring keluarnya UU No. 23 tahun 1999

tentang Bank Indonesia, maka BI tidak lagi menyalurkan dana KLBI. Oleh karena itu, untuk pengembangan UMKM dan sektor pertanian sumber dana berasal dari dana perbankan.

Program KKP yaitu skim kredit investasi dan modal kerja yang diperuntukan bagi pengembangan sektor pertanian, peternakan dan pengadaan pangan. Skim kredit KKP dikembangkan dengan pola subsidi bunga, sementara untuk bank pelaksana di tetapkan oleh pemerintah setelah bank tersebut mengajukan permohonan dan disertai dengan kesediaan untuk menyediakan KKP dengan persyaratan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. (Fachrurrazi, 2005)

**Tabel. 3.2 Besarnya subsidi bunga pada program KKP setelah adanya penyesuaian tahun 2004.**

Uraian	Dari 1 Agustus s.d 31 Juli 2004	Mulai 1 Agustus 2004
Landing rate	18	14,5
Subsidi bunga		
- Pangan	9	7,5
- Non pangan	5	4,5
Tingkat bunga kepada penerima KKP		
- Pangan	9	7
- Non pangan	13	10

Sumber: Fachrurrazi, 2005

Perbedaan kredit KKP dengan KUR adalah adanya pola subsidi bunga pada KKP, sementara pada KUR subsidi bunga dialihkan dengan penyediaan Imbal Jasa Penjaminan oleh pemerintah. Petani yang terbiasa menerima fasilitas subsidi bunga pada program KKP dan KUT, sehingga saat KUR di luncurkan menilai suku bunga KUR terlalu tinggi, dan berdasarkan evaluasi pelaksanaan KUR hal ini kerap menjadi kendala penyaluran KUR kepada sektor pertanian.

### 3.3 Lembaga Pelaksana KUR

Berdasarkan MoU antara Pemerintah, Bank Pelaksana, dan Lembaga Penjaminan, ditetapkan enam bank pelaksana KUR yaitu Masing-masing Bank BNI, BRI, Mandiri, BTN, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Sementara dua lembaga penjaminan yang menjadi penjamin kredit yaitu PT. Askindo dan Perum



Sarana Pengembangan Usaha (SPU) yang sekarang berubah nama menjadi Perum Jamkrindo.

### 3.3.1. Bank Pelaksana KUR

Enam bank pelaksana Program KUR yang ditunjuk pemerintah merupakan bank Persero (BUMN), kecuali bank Bukopin yang bestatus Bank swasta devisa nasional. Namun demikian, Bank Bukopin merupakan bank yang menyanggah platform usaha Koperasi, yang sebagian besar kepemilikan sahamnya oleh perusahaan negara. Penunjukan enam bank pemerintah ini, tidak lepas dari status program KUR yang merupakan pilot project sistem kredit bagi UMKM, sehingga akan lebih mudah bagi pemerintah untuk melakukan kontrol dengan bank Persero. Namun demikian, penunjukan enam bank Persero secara langsung oleh pemerintah bukan tanpa kendala dalam pelaksanaan KUR, karena masing-masing bank memiliki segmentasi bisnis yang berbeda, seperti BRI yang memang fokus kepada UMKM, namun bank lain seperti BTN adalah bank yang fokus kepada sektor properti.

**Tabel. 3.3. Kondisi Bank-Bank Pelaksana Program KUR  
(Posisi Bulan Desember 2008)**

Bank	Total Asset (Rp. Juta)	Total Kredit (Rp.juta)	Total Kredit UMKM (Rp.juta)	Porsi Kredit UMKM (%)
BNI	200.390.50	108.525.06	23.058.158	21,25
BRI	246.026.22	160.609.44	93.158.996	58,00
Mandiri	338.404.26	158.429.15	23.192620	14,64
BTN	45.064.428	32.025.231	1.606.255	5,02
Bukopin	32.797.660	22.847.291	7.636.501	33,42
BSM	17.063.838	11.054.068	n.a	60,0

Sumber: Masing-masing bank, dan LBU Bank Indonesia.

Selain itu, diantara bank-bank pelaksana KUR, juga memiliki perbedaan yang besar dari aspek internal bank terutama permodalan dan asset. Tiga bank yaitu BNI, Mandiri, dan BRI seperti yang terlihat pada Tabel 3.3 merupakan bank dengan asset yang besar lebih dari Rp. 200 triliun, sementara tiga bank lainnya memiliki asset di bawah Rp. 50 triliun.

Porsi kredit UMKM terhadap total kredit bank menggambarkan konsentrasi usaha dari masing-masing bank. Berdasarkan Tabel 3.3 dari enam bank dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu bank besar dengan asset lebih dari Rp. 200 triliun dan bank menengah dengan asset di bawah Rp. 50 triliun. Pada kelompok bank besar, Bank BRI merupakan bank yang paling fokus kepada sektor UMKM dengan porsi kredit UMKM sebesar 58% dari total kredit. Sementara bank Mandiri dan BNI yang selama ini lebih fokus kepada sektor korporasi, beberapa tahun terakhir mulai meningkatkan porsi kredit UMKM, dalam hal ini porsi kredit UMKM Bank BNI relatif cukup besar. Sementara itu, pada kelompok bank menengah, hanya Bank BSM dan Bukopin yang memiliki segmentasi kredit kepada UMKM. Sementara itu, bank BTN yang merupakan bank yang selama ini fokus kepada sektor perumahan, memiliki porsi kredit UMKM yang sangat kecil.

### 3.3.2. Lembaga Penjamin Kredit

Dua lembaga penjamin kredit atau asuransi yang ditunjuk pemerintah dalam Program KUR, merupakan perusahaan BUMN yaitu PT.Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

#### a. PT. Askrindo

PT. Askrindo merupakan Institusi Penjaminan (*Collateral Institution*) yang semua sahamnya dimiliki oleh negara. PT. Askrindo berdiri tahun 1971, berdasarkan PP No. 1 Tahun 1971.

- Pemegang Saham (Shold Holder) PT. Askrindo yaitu atas nama:  
Bank Indonesia dan Departemen Keuangan.

- Equitas dan Penempatan Modal Negara (PNM) 1, 7 Triliun

Visi :Lembaga Penjamin yang Handal & Terpercaya

Misi :Membantu Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional melalui pemberdayaan UMKM dengan memberikan penjaminan Perbankan dan Non Bank yang menyalurkan kredit kepada seluruh UMKM

- Jumlah Kantor pelayanan : 32 dan terus di kembangkan seiring Program KUR
- Sejak berdiri sampai sekarang telah membantu lebih dari 7,4 juta pelaku UMKM.
- Rencana Penjaminan Kredit UMKM dan IJP PT. Askrindo dalam Program KUR adalah seperti pada Tabel.3.4.

**Tabel 3.4. Rencana Target Penjaminan dan IJP PT.Askrindo Tahun 2007-2012.**

Tahun	Target Penjaminan (Rp. Juta)	IJP (Rp.juta)
2007	35,8	0,54
2008	3.964,20	60
2009	4.500,00	108,77
2010	4.500,00	142,3
2011	4.500,00	165,37
2012	4.500,00	181,23

Sumber: Business Plan PT.Askrindo

Keterangan:

1. Tarif penjaminan 1,5% per tahun
2. Asumsi jangka waktu penjaminan kredit rata-rata adalah 3 tahun.
3. Data berdasarkan business plan Adkrindo (pemanfaatan tambahan PMN)

b. Perum Jamkrindo

Sejak awal berdiri tahun 1970, Perum Jamkrindo telah beberapa kali berganti nama yaitu:

- Sejarah Perum Jamkrindo
  - Tahun 1970-1981, bernama Lembaga Penjamin Kredit Koperasi. Skim kredit yang dijamin diantaranya: KKP, TRI, Kredit Padi Palawija, Kredit Pengadaan Pupuk.
  - Tahun 1981-2000, berganti nama menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), didirikan oleh Pemerintah berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 1981 dan selanjutnya melalui PP Nomor 27 Tahun 1985. *Skim Kredit yang dijamin* : KKP, TRI, GLP & GLK, Kopelra, RMU, Kredit Sapi Perah, Kredit Padi Palawija Cengkeh, Kredit Pengadaan Pupuk, KUT.
  - Tahun 2000-2008, berubah nama menjadi Perum Sarana pengembangan Usaha (Perum SPU) dengan dasar perubahan Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor: 95 Tahun 2000 tentang Perum Sarana Pengembangan Usaha. Skim penjaminan kredit dengan *Business oriented* untuk pengembangan UMKM

- Tahun 2008-sekarang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Tahun 2008 pada tanggal 19 Mei 2008 oleh Presiden Republik Indonesia, SPU diubah menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo).
- Visi : Menjadi perusahaan penjamin yang kompetitif, terpercaya, sehat dan berkembang dalam meningkatkan peran koperasi, usaha kecil dan menengah (UKMK) menuju terciptanya perekonomian nasional yang seimbang dan mantap.
- Misi
  - Melakukan kegiatan usaha penjaminan, pinjaman bagi hasil dan *surety bond* serta bantuan manajemen dan konsultasi bagi pengembangan bisnis UKMK agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang tangguh;
  - Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan sehingga mampu berkembang, sekaligus memupuk keuntungan guna memberikan pelayanan yang lebih luas kepada nasabah, mitra bisnisnya serta kemanfaatan bagi perusahaan;
  - Proaktif terhadap segala perubahan dan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait.
- Kinerja Perum Jamkrindo

**Tabel 3.5. Perkembangan Kinerja Perum SPU/Jamkrindo Tahun 2002-2007 (Rp.Juta)**

Tahun	Volume Kredit yang dijamin	Jumlah Nasabah KUKM	Outstanding Penjaminan	Laba	Assets	Ekuitas
2002	1.336.390	43.121	2.078.000	21.231	332.532	231.552
2003	2.830.219	100.041	4.491.000	21.922	351.773	241.510
2004	5.775.837	158.319	8.603.000	27.798	382.205	257.070
2005	8.997.859	209.080	14.249.000	26.766	401.592	270.590
2006	12.563.539	255.089	22.157.000	33.580	442.086	295.064
2007	16.815.759	313.151	32.100.000	79.674	1.151.294	980.939

Sumber: Perum SPU, 2008

- Jumlah Kantor Cabang, sampai tahun 2008 telah ada di 22 Provinsi sehingga dalam program KUR ditargetkan Perum Jamkrindo dapat melakukan penjaminan kredit KUR sebesar Rp.5,97 triliun hingga tahun 2009.

**Tabel 3.6. Target Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)  
Perum Jamkrindo**

Uraian	2007	2008	2009	Total 3 Th
Volume Kredit yang Dijamin (Rp. Juta)	28,29	2.695,14	3.248,00	5.971,43
Jumlah UMKM	1.132	107.806	129.920	238.858
Penyerapan Tenaga Kerja	3.395	323.417	389.760	716.572

Sumber: Perum SPU, 2008

Keterangan:

- Penjaminan diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang layak (feasible)
- Rata-rata plafond kredit sebesar Rp 25 juta / nasabah
- Satu nasabah menyerap 3 tenaga kerja

### 3.4 Pelaksanaan KUR Tahun 2008

KUR yang di luncurkan sejak akhir tahun 2007, secara efektif baru berjalan pada tahun 2008. Hal ini terkait dengan berbagai aturan KUR yang baru terbit pada bulan Januari 2008 setelah terbentuknya Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Keputusan Menko Bidang Perekonomian No. KEP-05/M.Ekon/01/2008 tanggal 31 Januari 2008.

#### 3.4.1 Realisasi KUR

Berdasarkan data pada enam bank pelaksana KUR, sepanjang tahun 2008 KUR yang tersalurkan mencapai Rp. 12,6 triliun. Awal penyaluran KUR dari Januari s.d September realisasi KUR pada masing-masing bank pelaksana cukup cepat, namun memasuki bulan Oktober 2008, seiring krisis ekonomi global penyaluran KUR mulai melambat, akibat bank-bank mulai mengalami kelangkaan likuiditas, dan makin menurunnya kualitas dari calon debitur terutama di sektor pertanian, akibat ketidakpastian harga komoditas pertanian yang cenderung turun.

Berdasarkan Tabel: 3.7 terlihat bahwa realisasi penyaluran KUR tahun 2008 didominasi oleh Bank Rakyat Indonesia. Timbangnya realisasi penyaluran dari masing-masing bank, karena setiap bank memiliki segmentasi pasar yang berbeda.

BRI merupakan bank yang telah memiliki jaringan infrastruktur yang kuat sampai kepedesaan untuk mengakses pelaku UMKM. Sehingga dalam merealisasikan KUR BRI tidak memiliki kendala seperti yang dihadapi oleh bank-bank lain.

**Tabel:3.7 Realisasi Penyaluran KUR Menurut Bank Pelaksana s.d Desember Tahun 2008**

Bank	Kredit (Rp. miliar)	Jumlah Debitur	Rata-rata kredit per debitur (Rp. Juta)	Persentase KUR thd KUR Nasional (%)
BNI	1.163,9	8954	12,99	9,22
BRI	9.201,9	1.615.979	5,69	72,89
MANDIRI	1.142,7	37.010	30,87	9,05
BTN	166,0	1.036	160,23	1,31
BUKOPIN	623,2	2.944	211,68	4,94
BSM	326,4	5.707	57,19	2,59
Total	12.624,1	1.671.630	7,56	

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Berbeda dengan BRI yang telah memiliki infrastruktur kantor pelayanan terutama untuk kredit kecil dan mikro yang menyebar di setiap daerah, bank-bank lainnya seperti Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri belum memiliki jangkauan pelayanan di seluruh Indonesia. Layanan bank-bank ini biasanya pun terbatas di ibu kota provinsi atau di kota-kota tertentu. Sementara itu Bank Mandiri dan BNI kendati telah memiliki jangkauan pelayanan di seluruh Provinsi namun selama ini kedua bank ini memiliki segmentasi usaha pada kredit komersial. Baru beberapa tahun terakhir keduanya makin intensif menjangkau pangsa pasar sektor UMKM, dan selama tahun 2008, realisasi KUR oleh Bank BNI dan BRI cukup tinggi yaitu di atas Rp. 1 triliun.

Berdasarkan angka rata-rata KUR per debitur pada tahun 2008 secara nasional cukup baik yaitu Rp 7,56 juta. Hal ini tidak lepas dari dominasi kredit mikro yang disalurkan oleh BRI. Namun untuk bank Bukopin dan BTN memiliki rata-rata kredit per debitur yang cukup tinggi, sehingga akan berpengaruh kepada kualitas kredit KUR yang disalurkan. Rendahnya minat bank untuk menyalurkan kredit mikro karena tingginya biaya penyaluran yang harus dikeluarkan. Kendati tingkat suku bunga yang di tawarkan untuk kredit mikro ini cukup tinggi yaitu maksimal 24%, namun bank-bank diluar bank BRI tidak memiliki infrastruktur pelayanan sampai ke tingkat pedesaan, sehingga bank-bank ini kesulitan untuk mengambil ceruk pasar di segmen mikro. Namun untuk menyalurkan KUR mikro di bawah Rp. 5 juta ini, bank

diluar BRI dapat memanfaatkan pola penyaluran melalui *channeling* dengan koperasi-koperasi atau lembaga keuangan mikro.

**Tabel 3.8 Penyaluran KUR Secara Nasional menurut Sektor Ekonomi Sampai dengan Desember 2008**

NO	Sektor Ekonomi	Total Kredit (Rp Juta)	Total Debitur	Persentase kredit per sektor thd total kredit KUR
1	Pertanian	2,769,301	427,417	21,19
2	Pertambangan	181,932	46,703	1,44
3	Industri Pengolahan	247,032	1,787	1,96
4	Listrik, Gas & Air	8,056	1,866	0,06
5	Konstruksi	221,634	946	1,76
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,388,022	976,815	58,52
7	Perumahan	-	-	-
8	Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi	62,019	414	0,49
9	Jasa-jasa Dunia Usaha	369,414	22,552	2,92
10	Jasa-jasa Sosial/ Masyarakat	886,029	189,427	7,02
11	Lain-lain	490,746	3,741	3,89
	Total	12,624,185	1.671.630	100

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Menurut sektor ekonomi, KUR yang disalurkan sepanjang tahun 2008 dominan pada dua sektor saja, yaitu sektor perdagangan dan sektor pertanian. Kedua sektor ini menyerap sebesar 79,71% kredit KUR yang direalisasikan. Tingginya penyerapan pada kedua sektor ini, karena dari sisi kelayakan usaha sektor perdagangan lebih mudah untuk diprediksi. Karakteristik dari sektor perdagangan yang lebih mengutamakan arus *cash flow* dibandingkan tingkat bunga. Selama ini sektor perdagangan banyak yang tidak bisa mengakses permodalan dari perbankan karena sulitnya persyaratan terutama agunan kredit. Melalui KUR yang menjadi jaminan kreditnya adalah usaha mereka sendiri, sehingga sektor perdagangan lebih mudah mendapatkan kredit. Tingkat suku bunga KUR sebesar maksimal 16% juga lebih rendah dibandingkan memilih kredit tanpa agunan lainnya diluar sistem perbankan/program KUR.

Selain itu tingginya realisasi Kur di sektor perdagangan sejalan dengan pola penyaluran kredit UMKM perbankan secara nasional. Tahun 2008, dari total kredit

UMKM perbankan nasional Rp.633,9 triliun terbesar disalurkan untuk sektor lain-lain sebesar 52,8% dari total kredit dan sektor perdagangan sebesar 24,79%. Sementara penyaluran kredit UMKM nasional untuk sektor pertanian adalah sebesar 3,06%. Oleh karena itu, porsi KUR untuk sektor pertanian sebesar 21,19% jauh lebih besar dari pada porsi kredit UMKM untuk sektor pertanian secara nasional. Hal ini menunjukkan bank mulai memberikan kepercayaan kepada sektor ini dengan adanya penjaminan kredit.

Sementara itu, jangka waktu pinjaman KUR yang hanya 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi, mendorong perbankan untuk mencari sektor usaha yang lebih mudah dan cepat untuk mengembalikan kredit. Berdasarkan evaluasi dari Program KUR, rendahnya minat perbankan untuk menyalurkan kredit kepada sektor lainnya di luar sektor perdagangan dan pertanian, akibat sektor ini dinilai memiliki risiko kredit yang lebih tinggi.

Disamping kualitas kredit per debitur yang disalurkan dan sebaran KUR menurut sektor ekonomi, penyebaran KUR menurut wilayah juga harus diperhatikan. Hal ini untuk menghindari terjadinya konsentrasi KUR hanya untuk wilayah/daerah tertentu. Berdasarkan Tabel.3.9 penyaluran KUR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Namun untuk meningkatkan perekonomian daerah, KUR dapat dijadikan sarana untuk membantu peningkatan permodalan UMKM di daerah, terutama wilayah pedesaan. Sementara di wilayah Jawa yang perekonomiannya relatif lebih maju, memiliki banyak alternatif akses pembiayaan. Tingginya penyerapan KUR di Pulau Jawa tidak lepas dari kontribusi perekonomian yang terbesar di Pulau Jawa. Penyerapan KUR di Pulau Jawa tahun 2008 mencapai 51,5% dari total KUR nasional. Tiga Provinsi menyerap KUR terbesar masing-masing berturut-turut Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ke tiga provinsi ini pada tahun 2008 menyerap KUR sebesar Rp. 5,38 triliun atau 42,65% dari KUR Nasional. Sementara Provinsi dengan penyerapan KUR paling rendah adalah Maluku Utara dan Bangka Belitung, yang merupakan dua Provinsi hasil pemekaran wilayah dengan penyerapan KUR tahun 2008 sebesar Rp. 38 miliar.



**Tabel. 3.9 Penyaluran KUR secara Nasional menurut Provinsi dan Wilayah Tahun 2008**

NO	Provinsi	Total Kredit (Rp.juta)	Debitur	Persentase Kredit thd KUR Nasional
	<b>Sumatera</b>	<b>2884,93</b>	<b>271,647</b>	<b>22.83</b>
1	Nangroe Aceh Darussalam	314,068	29,275	2.49
2	Sumatera Utara	698,400	69,253	5.53
3	Sumatera Barat	275,544	32,802	2.18
4	Riau	423,292	22,694	3.35
5	Jambi	218,633	24,977	1.73
6	Sumatera Selatan	384,298	34,161	3.04
7	Bengkulu	113,633	12,591	0.90
8	Lampung	331,001	35,544	2.62
9	Kepulauan Riau	87,670	5,655	0.69
10	Bangka Belitung	38,391	4,695	0.30
	<b>Jawa</b>	<b>1117,556</b>	<b>1062,057</b>	<b>51.50</b>
11	DKI Jakarta	653,245	40,366	5.17
12	Jawa Barat	1,575,226	263,317	12.48
13	Jawa Tengah	1,885,508	369,465	14.94
14	D.I. Yogyakarta	211,719	40,978	1.68
15	Jawa Timur	1,922,835	318,646	15.23
16	Banten	252,592	29,285	2.00
	<b>Bali-Nusa Tenggara</b>	<b>567,178</b>	<b>74,868</b>	<b>4.49</b>
17	Bali	284,199	41,321	2.25
18	NTB	130,326	17,585	1.03
19	NTT	152,653	15,962	1.21
	<b>Kalimantan</b>	<b>1104,029</b>	<b>91,582</b>	<b>8.74</b>
20	Kalimantan Barat	325,922	21,735	2.58
21	Kalimantan Tengah	324,346	17,237	2.57
22	Kalimantan Selatan	215,205	28,711	1.70
23	Kalimantan Timur	238,556	23,899	1.89
	<b>Sulawesi</b>	<b>1267,524</b>	<b>150,347</b>	<b>10.04</b>
24	Sulawesi Utara	190,043	21,905	1.51
25	Sulawesi Tengah	148,285	19,074	1.17
26	Sulawesi Selatan	664,502	76,460	5.26
27	Sulawesi Tenggara	103,272	11,993	0.82
28	Gorontalo	73,862	10,699	0.59
29	Sulawesi Barat	87,560	10,216	0.69
	<b>Maluku-Irian</b>	<b>299,399</b>	<b>21,167</b>	<b>2.37</b>
30	Maluku	73,897	6,356	0.59
31	Maluku Utara	38,268	2,471	0.30
32	Irian Jaya Barat	63,401	3,717	0.50
33	Papua	123,833	8,623	0.98
	<b>TOTAL</b>	<b>12,624,185</b>	<b>1,671,668</b>	<b>100</b>

Penyaluran KUR oleh perbankan di Pulau Jawa sebesar 51,5% dari KUR nasional pada tahun 2008, menunjukkan pola penyaluran KUR oleh bank pelaksana

mengikuti pola penyaluran kredit UMKM perbankan secara nasional. Berdasarkan data kredit UMKM menurut wilayah tahun 2008, kredit UMKM di Pulau Jawa mencapai 63,46%. Porsi KUR di Pulau Jawa yang relatif lebih rendah di bandingkan dengan porsi kredit UMKM secara nasional mengindikasikan adanya kecenderungan bank untuk memperluas penyaluran KUR di luar Jawa, kendati porsi kreditnya masih relatif kecil dibandingkan dengan di Pulau Jawa.

### 3.4.2 Kredit Macet KUR

KUR yang dirancang untuk membantu akses kredit/pembiayaan kepada usaha yang *feasible* namun tidak *bankable*, namun dengan jaminan kredit oleh pemerintah melalui lembaga penjaminan, berpotensi menimbulkan *moral hazard* pada debitur. Hal ini terjadi karena Program KUR bisa disalahartikan sebagai program bantuan dari pemerintah, pada hal kredit yang disalurkan merupakan dana perbankan. Berdasarkan Tabel 3.10 terlihat sepanjang tahun 2008, besarnya kredit bermasalah (NPL) masing-masing bank pelaksana KUR masih rendah dan secara nasional besarnya NPL KUR adalah 1,15%. Hal ini menunjukkan sepanjang tahun 2008 debitur KUR cukup lancar dalam membayar cicilan kredit.

**Tabel 3.10. Kredit Macet KUR tahun 2008 dan 2009.**

Bank	NPL per Desember 2008	NPL Per April 2009
BNI	0,62	2,50
BRI	1,61	5,01
MANDIRI	0,38	0,64
BTN	1,31	4,30
BUKOPIN	1,91	7,38
BSM	1,06	4,59
Total	1,15	4,41

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Namun memasuki tahun 2009, NPL KUR meningkat tajam dan pada posisi bulan April 2009, besarnya NPL KUR secara nasional mencapai 4,41%, dimana Bank Bukopin memiliki NPL paling tinggi yaitu 7,38%. Tingginya NPL Bank Bukopin, karena jika dilihat dari rata-rata per debitur kredit KUR di Bank Bukopin juga besar yaitu di atas Rp 200 juta, sehingga jika beberapa debitur bermasalah akan berpengaruh kepada NPL, karena rendahnya sebaran risiko.

### 3.4.3 Pengaruh KUR terhadap Kredit UMKM

Program KUR diharapkan akan dapat memperbesar kredit perbankan kepada sektor UMKM. Kredit KUR yang di tetapkan maksimal Rp. 500 juta di maksudkan untuk memperbesar jumlah debitur yang dapat menerima KUR. Untuk melihat pengaruh Program KUR terhadap kredit perbankan kepada sektor UMKM, dapat dilihat melalui realisasi Kredit Usaha Kecil (KUK) oleh masing-masing bank. Berdasarkan pelaporan ke Bank Indonesia, KUK perbankan merupakan kredit investasi dan modal kerja yang berjumlah di bawah Rp.500 juta. Sehingga dengan demikian kredit KUR kepada UMKM ini di golongan kepada kredit KUK.

**Tabel 3.11: Kredit KUK, dan Total Kredit Tahun 2007-2008 dan Kredit KUR**

Bank	Total Kredit (miliar)		Total KUK (Rp.miliar)		Persentase KUK thd Total Kredit		KUR (Rp. miliar)	Persentase KUR thd KUK
	2007	2008	2007	2008	2007	2008		
BNI	88.676.190	108.525.064	17.812.628	23.489.823	20,08	21,64	1.163,9	4,95
BRI	113.853.335	160.609.446	34.272.151	45.136.092	30,10	28,10	9.201,9	20,38
MANDIRI	126.826.445	158.429.156	4.201.676	4.233.291	3,31	2,67	1.142,7	26,99
BTN	22.354.761	32.025.231	11.701.273	14.426.811	52,34	45,05	166,0	1,15
BUKOPIN	19.124.573	22.847.291	2.427.225	2.736.845	12,69	11,86	623,2	22,77
BSM	4.312.045	6.881.805	299.757	396.532	6,95	7,15	326,4	82,31

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)

Berdasarkan Tabel 3.11, jumlah Kredit Usaha Kecil (KUK) semua bank pelaksana KUR meningkat pada tahun 2008, dibandingkan dengan tahun 2007. Peningkatan jumlah KUK terbesar oleh Bank BRI, dimana kredit KUK tahun 2008 meningkat sebesar Rp. 10,86 triliun di bandingkan tahun 2007. Sementara peningkatan KUK terendah yaitu KUK Bank Syariah Mandiri, yang meningkat sebesar Rp. 96,77 miliar. Namun jika dilihat dari porsi KUK terhadap total kredit, porsi KUK Bank BRI tahun 2008 sebesar 28,1% justru turun dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 30,1%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan kredit non KUK lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit KUK. Kondisi serupa juga terjadi pada Bank Mandiri, BTN, dan Bukopin, dimana pertumbuhan kredit Non KUK tahun 2008 lebih

tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit KUK. Sementara Bank BNI dan Bank Syariah Mandiri, mengalami peningkatan porsi kredit KUK pada tahun 2008 dibandingkan porsi kredit KUK pada tahun 2007. Peningkatan porsi KUK ini menunjukkan pertumbuhan kredit untuk KUK lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit Non KUK. Peningkatan porsi kredit KUK sepanjang tahun 2008 mengindikasikan adanya pengaruh program KUR terhadap kredit UMKM pada perbankan.

Sementara jika dilihat berdasarkan rasio KUR terhadap KUK, terlihat bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki porsi KUR terhadap KUK sebesar 82,31%. Hal ini menunjukkan sepanjang tahun 2008, BSM fokus memanfaatkan KUR untuk menyalurkan kredit di bawah Rp. 500 juta, namun jika di lihat dari peningkatan porsi KUK BSM adalah paling kecil. Kondisi ini menunjukkan fasilitas program KUR kepada BSM, justru mengurangi minat bank ini untuk menyalurkan kredit KUK di luar KUR. Kondisi yang sama juga terjadi pada Bank Mandiri dan Bukopin, dimana program KUR tidak berpengaruh banyak terhadap peningkatan kredit KUK.

### 3.5 Kendala dari KUR Tahun 2008

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan KUR tahun 2008, sejumlah kendala dalam penyaluran KUR antara lain (Kemenneg Koperasi dan UKM, 2009):

1. Belum optimalnya implementasi pasal 2 MoU antara Pemerintah, Perusahaan Penjaminan dan Bank Pelaksana yaitu:
  - a. Persiapan UMKM untuk dibiayai KUR
  - b. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap calon debitur KUR
  - c. Fasilitasi hubungan UMKM dengan perusahaan Inti/*Offteker*
2. Calon debitur baru sering ditolak oleh bank karena:
  - a. Alokasi KUR telah habis
  - b. Yang bersangkutan telah memiliki kartu kredit, kredit kepemilikan rumah dan kendaraan meskipun kreditnya dalam kondisi lancar.
3. Penyaluran KUR oleh Bank Pelaksana belum merata secara sektor usaha.
4. Suku bunga KUR Mikro (24%) dianggap terlalu tinggi.

5. *Linkage* program penyaluran KUR-Mikro melalui BPR, BMT, KSP dan LKM belum berjalan seperti yang diharapkan.
6. Dalam praktek masih ditemukan debitur masih diwajibkan untuk memenuhi agunan tambahan sebelum yang bersangkutan dinilai kelayakannya.
7. Kapasitas Perusahaan Penjamin untuk menjamin KUR sudah mencapai 90 % sementara Kepastian penambahan APBN untuk PMN Askrindo dan Jamkrindo belum ada kejelasan.
8. Ketentuan pelaksanaan KUR antar bank pelaksana tidak sama, sehingga Dinas terkait kesulitan untuk mensosialisasikan KUR.

Sementara itu berdasarkan catatan dari bank pelaksana (bank BRI), beberapa persoalan yang masih menjadi kendala dalam menyalurkan KUR adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya pemahaman yang seragam terhadap skim KUR baik oleh para petugas bank di lapangan maupun masyarakat, sehingga masih ada persepsi yang keliru tentang KUR, misalnya: tentang agunan bagi bank sebagai alat untuk melihat character calon debitur, bagi masyarakat menganggap agunan merupakan syarat diberikannya kredit agar kalau menunggak bisa disita.
2. Pemenuhan tenaga pemasaran tidak bisa seketika, namun harus secara bertahap mengingat pemberian KUR harus dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian dalam perbankan, sehingga diperlukan kompetensi yang sesuai.
3. Pasal 2 Addendum Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan Mei 2008 yang mensyaratkan adanya Bank Indonesia *Checking* pada saat pendaftaran KUR dapat menghambat/ memperlambat proses pelayanan KUR, mengingat masih ada jaringan bank yang ada di pelosok desa yang belum menerapkan sistem teknologi secara *on line*.
4. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 Tgl. 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR yang mensyaratkan KUR hanya dapat diberikan kepada Debitur baru yang belum pernah mendapatkan kredit dari bank yang dibuktikan dengan Bank Indonesia *checking* pada saat pendaftaran kredit dan belum pernah mendapatkan fasilitas kredit program dari pemerintah, akan

menghambat kelangsungan perkembangan usaha mikro yang mendapat KUR dibawah Rp 5 juta. Hal ini disebabkan sangat sulit bagi mereka untuk langsung beralih dari KUR menjadi nasabah komersial biasa yang harus memenuhi beberapa persyaratan perbankan, termasuk suku bunga yang lebih tinggi.

### 3.6 KUR kredit tanpa agunan atau kredit dengan penjaminan?

Berdasarkan definisi dari KUR yaitu skema kredit/pembiayaan yang khusus diperuntukan bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan (panflet sosialisasi KUR oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2007). Berdasarkan definisi dan sosialisasi KUR, kredit KUR tidak mewajibkan jaminan tambahan kepada debitur UMKM, sementara jaminan pokoknya adalah usaha dari debitur itu sendiri. Namun demikian sepanjang pelaksanaan KUR, perbankan masih memintakan jaminan tambahan sebesar 30% kepada debitur tertentu, hal ini dilakukan untuk mengikat nasabah, dan menghindari terjadinya moral hazard dari debitur. Potensi moral hazard ini sangat besar, karena berdasarkan perkembangan pelaksanaan KUR, masih banyak pandangan dari masyarakat bahwa KUR adalah program bantuan pemerintah, pada hal KUR merupakan murni dana dari perbankan yang dijamin oleh lembaga penjaminan.

Perdebatan terhadap boleh atau tidaknya bank memintakan jaminan tambahan kepada debitur, akhirnya diputuskan melalui Komite Kebijakan. Berdasarkan Standar Operational Prosedur (SOP) NO. KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009 yang diterbitkan tanggal 28 April 2009, yang diantaranya mengizinkan bank untuk menarik jaminan tambahan maksimal sampai 50% dari kredit.

Adapun pokok-pokok dari SOP tanggal 28 April 2009 tersebut adalah:

1. Debitur baru adalah debitur yang tidak sedang menerima kredit/pembiayaan
2. Agunan tambahan:
  - a. Besarnya sesuai dengan ketentuan bank (maksimum 50% dari kredit/pembiayaan yang disalurkan)
  - b. Pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku di bank pemberi kredit

3. Pola penyaluran *tidak langsung* melalui lembaga linkage (pola executing dan channeling):
  - a. Pola executing:
    - debitur adalah lembaga linkage,
    - yang mendapat penjaminan adalah lembaga linkage,
    - yang bertanggung jawab atas pengembalian kredit/pembiayaan adalah lembaga linkage,
    - jumlah kredit/pembiayaan kepada debitur/lembaga linkage maksimum Rp 500 juta.
  - b. Pola channeling
    - debitur adalah UMKM,
    - yang mendapat penjaminan adalah UMKM,
    - yang bertanggung jawab atas pengembalian kredit/pembiayaan adalah UMKM, lembaga linkage hanya meneruskan,
    - jumlah kredit/pembiayaan kepada debitur/UMKM maksimum Rp 500 juta.
4. Perpanjangan, Suplesi (tambahan pinjaman) dan Restrukturisasi
  - a. Kepada Debitur KUR eksisting yang usahanya meningkat, dan memerlukan tambahan kredit maka dapat diberikan perpanjangan berupa tambahan plafond kredit maupun jangka waktu terhadap debitur tersebut tanpa menunggu pinjaman yang bersangkutan dilunasi, dengan ketentuan:
    - Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikategorikan *bankable*,
    - Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp 5 juta untuk KUR yang dibebani bunga pinjaman maksimal 24% efektif per tahun, atau tidak melebihi sebesar Rp 500 juta untuk KUR yang dibebani bunga pinjaman maksimal sebesar 16% efektif per tahun,
    - Total jangka waktu pinjaman setelah penambahan tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja, atau 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi terhitung mulai tanggal efektifnya pengajuan kredit antara bank pemberi KUR dan UMKM.

- b. KUR yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di bank pemberi kredit/pembiayaan, dengan ketentuan:
- Tidak diperbolehkan penambahan limit pinjaman
  - Dapat diberikan penambahan jangka waktu kredit maksimum 1 (satu) tahun untuk Kredit Modal Kerja, dan 2 (dua) tahun untuk Kredit Investasi,
  - Terhadap restrukturisasi yang sudah dilakukan tidak menggugurkan hak klaim (sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait).

### 3.7 Pelaksanaan KUR pada masing-masing Bank

Secara garis besar pokok-pokok ketentuan terhadap Program KUR mengacu kepada hasil MoU dan ketetapan yang telah dibuat oleh Komite Kebijakan KUR. Namun untuk teknis pelaksanaannya, diserahkan kepada masing-masing bank pelaksana, dengan tetap mengacu kepada pedoman pokok. Ada pun ketentuan dan tata cara pengajuan KUR pada masing-masing bank pelaksana KUR adalah:

#### 3.7.1 Pelaksanaan KUR di Bank BNI

Berdasarkan ketentuan dari Bank BNI, prosedur penyaluran KUR di Bank BNI adalah:

1. Dapat diberikan kepada debitur perorangan, kelompok, perusahaan dan koperasi.
2. Usaha *feasible* namun belum *bankable*
3. Sektor yang dibiayai: pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, serta sektor industri dan perdagangan.
4. Berpengalaman berusaha minimal 1 tahun.
5. Memiliki legalitas usaha, minimal surat keterangan berusaha dari kecamatan/kelurahan setempat untuk kredit s.d Rp.150 juta.
6. Memiliki identitas diri (KTP, Kartu Keluarga, atau identitas lainnya) untuk perorangan dan akte pendirian untuk badan usaha dan koperasi.
7. Kredit di atas Rp.50 juta harus mempunyai NPWP.
8. Calon debitur tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah atau tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.
9. Jenis dan jangka waktu kredit: kredit modal kerja (KMK) s.d 5 tahun, dan Kredit Investasi (KI) s.d 10 tahun.



10. Suku bunga maksimum 16% efektif per tahun.
11. Biaya provisi: bebas
12. Biaya pengelolaan rekening bebas.

a. Sebaran KUR menurut Sektor ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi, sebaran KUR oleh Bank BNI sebagian besar adalah untuk sektor perdagangan. Dari total KUR yang di salurkan Bank BNI sebesar Rp. 1,16 triliun, sebesar 77,04% di kucurkan untuk sektor perdagangan, dan 10,15% di salurkan kepada sektor pertanian. Sementara di luar ke dua sektor ini, penyerapan KUR sangat kecil sekali, yaitu di bawah 5%.

**Tabel. 3.12. Sebaran KUR Bank BNI Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2008.**

NO	Sektor Ekonomi	Bank BNI		Persentase Sektor terhadap Total KUR BNI
		Total Kredit (Rp Juta)	Total Debitur	
1	Pertanian	118.136	841	10,15
2	Pertambangan	900	5	0,08
3	Industri Pengolahan	55.734	471	4,79
4	Listrik, Gas & Air	455	6	0,04
5	Konstruksi	12.402	62	1,07
6	Perdagangan, Restoran & Hotel	896.582	7.000	77,04
7	Perumahan	-	-	-
8	Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi	10.681	63	0,92
9	Jasa-jasa Dunia Usaha	54.073	429	4,65
10	Jasa-jasa Sosial/ Masyarakat	14.897	121	1,28
11	Lain-lain	-	-	-
	Total	1.163.861	8.998	

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

b. Sebaran KUR menurut Provinsi tahun 2008

Sebaran KUR bank BNI menurut provinsi tahun 2008, terbesar di Provinsi Jawa tengah yang menyerap 14,8%, diikuti dengan Provinsi Sumatera Utara dengan penyerapan KUR sebesar 10,95%, dan Jawa Timur sebesar 10,67%.

**Tabel 3.13. Sebaran KUR Bank BNI Menurut Provinsi, Tahun 2008.**

NO	Provinsi	BNI		
		Total Kredit (Rp Juta)	Total Debitur	Persentase KUR Provinsi thd KUR BNI
1	Nangroe Aceh Darussalam	25.760	154	2,21
2	Sumatera Utara	127.388	934	10,95
3	Sumatera Barat	35.331	266	3,04
4	Riau	27.043	218	2,32
5	Jambi	31.360	393	2,69
6	Sumatera Selatan	33.956	329	2,92
7	Bengkulu	9.216	90	0,79
8	Lampung	98.518	674	8,46
9	Kepulauan Riau	6.004	59	0,52
10	Bangka Belitung	100	4	0,01
11	DKI Jakarta	56.113	210	4,82
12	Jawa Barat	108.735	819	9,34
13	Jawa Tengah	172.303	1.422	14,80
14	D.I. Yogyakarta	6.080	71	0,52
15	Jawa Timur	124.230	1.075	10,67
16	Banten	10.772	58	0,93
17	Bali	17.980	138	1,54
18	NTB	26.603	169	2,29
19	NTT	12.406	104	1,07
20	Kalimantan Barat	17.749	167	1,53
21	Kalimantan Tengah	3.558	51	0,31
22	Kalimantan Selatan	30.999	180	2,66
23	Kalimantan Timur	18.568	154	1,60
24	Sulawesi Utara	29.858	246	2,57
25	Sulawesi Tengah	15.093	218	1,30
26	Sulawesi Selatan	54.652	333	4,70
27	Sulawesi Tenggara	12.232	127	1,05
28	Gorontalo	3.325	35	0,29
29	Sulawesi Barat	8.272	61	0,71
30	Maluku	9.494	53	0,82
31	Maluku Utara	14.626	73	1,26
32	Irian Jaya Barat	8.420	44	0,72
33	Papua	7.116	69	0,61
	<b>TOTAL</b>	<b>1.163.861</b>	<b>8.998</b>	

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

### 3.7.2 Pelaksanaan KUR di Bank BRI

Tata cara pengajuan KUR di Bank BRI:

1. Persyaratan calon debitur UMKM dan koperasi yang dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah individu (perorangan/badan hukum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha produktif dan memenuhi syarat antara lain:
  - a. Legalitas perorangan dan Badan Usaha/Hukum.
    - (1) Individu : KTP dan Kartu Keluarga
    - (2) Kelompok : Surat pengukuhan instansi terkait/Surat Keterangan Usaha dari lurah/kepala desa dan/atau akta notaris.
    - (3) Koperasi: AD/ART beserta perubahannya.
    - (4) Badan hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. Perijinan usaha
    - (1) Untuk kredit dengan plafon s.d Rp.100 juta, ijin usaha antara lain TDP, SIUP, dan SITU dapat digantikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah.
    - (2) Pinjaman dengan plafon di atas Rp.100 juta perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. UMKM dan koperasi yang baru memulai usaha, minimal usahanya telah berjalan selama 6 bulan.
3. Jenis kredit dan jangka waktu kredit:
  - a. Kredit modal kerja jangka waktu maksimal 3 tahun
  - b. Kredit investasi jangka waktu 5 tahun
4. Besarnya nilai pinjaman disesuaikan dengan kelayakan usaha maksimal Rp.500 juta
5. Sharing dana sendiri untuk kredit investasi minimum 35 %.
6. Suku bunga maksimal 16% pa untuk kredit ritel dan maksimum 24% untuk kredit mikro di bawah Rp.5 juta, reviewable sesuai ketentuan pemerintah.
7. Bentuk kredit: prosedur rekening koran maksimum CO menurun, untuk kredit maksimum dapat sekaligus lunas (maksimal jangka waktu 1 tahun dengan pembayaran pokok dan bunga).
8. Biaya administrasi dan provisi tidak dipungut.
9. Agunan:

- Agunan pokok berupa proyek yang dibiayai
- Agunan tambahan ringan dan tidak diwajibkan

10. Sistem dan prosedur kredit:

- a. UMKM dan koperasi dapat mengajukan permohonan kredit/pinjaman ke kantor bank BRI.
- b. Permohonan kredit dengan melampirkan:
  - Copy legalitas dan perijinan
  - Data usaha dan dokumen untuk keperluan analisa kebutuhan kredit
  - On the spot ke tempat usaha oleh pejabat kredit lini
  - Hasil analisa kebutuhan kredit dituangkan dalam memorandum analisa kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diajukan ke pejabat pemutus untuk mendapatkan putusan kredit.

a Sebaran KUR menurut Sektor ekonomi

Penyaluran KUR oleh Bank BRI dikelompokkan menjadi dua yaitu KUR ritel untuk kredit KUR di atas Rp. 5 juta dan KUR mikro dengan jumlah kredit di bawah Rp. 5 juta. Dari enam bank pelaksana KUR, hanya BRI yang fokus untuk menyalurkan kredit mikro. BRI yang telah memiliki jaringan sampai ke pedesaan selama ini memang di kenal telah memiliki program kredit untuk usaha mikro di bawah Rp.5 juta, sehingga dengan adanya Program KUR, Bank BRI tidak terlalu sulit untuk mengambil ceruk KUR mikro. Berdasarkan ketentuan Program KUR, untuk kredit mikro tingkat suku bunga KUR maksimal 24% per tahun, sementara untuk kredit di atas Rp.5 juta besarnya suku bunga KUR di tetapkan maksimal 16% per tahun.

Berdasarkan sektor ekonomi, sebaran KUR oleh BRI terbesar disalurkan untuk sektor perdagangan, baik untuk KUR ritel maupun KUR mikro. Sektor perdagangan pada ke dua kelompok KUR ini menyerap 62,79% dari total KUR BRI. Sementara itu untuk KUR mikro BRI, penyerapan KUR oleh sektor pertanian cukup tinggi yaitu sebesar Rp.1,48 triliun atau 23,64% dari total KUR mikro, kendati masih di bawah serapan sektor perdagangan yang mencapai 60,59% dari total KUR mikro.

**Tabel.3.14. Sebaran KUR Bank BRI Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2008**

NO	SEKTOR EKONOMI	BRI Ritel		BRI Mikro	
		Total Kredit (Rp Juta)	Total Debitur	Total Kredit (Rp Juta)	Total Debitur
1	Pertanian	253.511	2.280	1.487.801	387.040
2	Pertambangan	1.625	9	175.380	46.676
3	Industri Pengolahan	126.896	1.068	-	-
4	Listrik, Gas & Air	1.556	20	4.937	1.833
5	Konstruksi	31.186	172	-	-
6	Perdagangan, Restoran & Hotel	1.964.195	18.012	3.813.712	949.070
7	Perumahan	-	-	-	-
8	Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi	24.354	192	-	-
9	Jasa-jasa Dunia Usaha	86.839	686	22.896	16.859
10	Jasa-jasa Sosial/ Masyarakat	43.123	328	788.948	188.561
11	Lain-lain	374.998	3.167	-	-
	Total	2.908.283	25.934	6.293.674	1.590.039

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

#### b Sebaran KUR menurut Provinsi

Sepanjang tahun 2008, realisasi KUR BRI tersebar di 33 Provinsi, baik untuk KUR mikro maupun KUR ritel. Untuk KUR retail, serapan kredit terbesar yaitu di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.402,2 miliar atau 13,83% dari total KUR retail. Daerah lain yang cukup besar penyerapan KUR retail BRI adalah Jawa Barat (10,18%), Jawa Tengah (8,74%), DKI Jakarta (8,90%), dan Sulawesi Selatan (7,09%). Sementara daerah dengan penyerapan terendah KUR retail BRI adalah Bangka Belitung (0,25) dan Maluku Utara (0,36%).

Untuk kredit KUR mikro realisasi terbesar pada tahun 2008 adalah di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah KUR sebesar Rp.1,28 triliun atau 20,42%. Diikuti Provinsi Jawa Timur (17,61) dan Jawa Barat (15,7%). Sementara daerah lainnya penyerapan KUR mikro di bawah 5,5%, dengan realisasi terendah di Irian Jaya Barat (0,26%) dan Maluku Utara (0,18%). Secara keseluruhan realisasi KUR BRI baik mikro maupun retail, terkonsentrasi di tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan penyerapan KUR sebesar Rp.4,33 triliun atau 47,09% dari total KUR BRI sebesar Rp. 9,20 triliun.

**Tabel. 3.15 Sebaran KUR Bank BRI Menurut Provinsi, Tahun 2008.**

NO	Provinsi	BRI		BRI Mikro	
		Total Kredit (Rp Juta)	Total Debitur	Total Kredit (Rp Juta)	Total Debitur
1	Nangroe Aceh Darussalam	134.096	861	128.812	27.708
2	Sumatera Utara	145.677	1.585	252.521	65.334
3	Sumatera Barat	51.146	595	141.038	31.643
4	Riau	148.695	1.095	94.461	19.812
5	Jambi	62.406	489	113.903	24.017
6	Sumatera Selatan	112.462	691	153.028	32.747
7	Bengkulu	27.355	284	57.667	12.075
8	Lampung	26.242	230	110.144	26.709
9	Kepulauan Riau	10.530	94	25.312	5.315
10	Bangka Belitung	7.296	43	21.629	4.603
11	DKI Jakarta	258.974	2.581	165.058	36.682
12	Jawa Barat	296.183	2.659	987.944	258.839
13	Jawa Tengah	254.293	2.992	1.284.877	352.898
14	D.I. Yogyakarta	38.630	504	147.458	39.848
15	Jawa Timur	402.203	3.183	1.108.024	307.790
16	Banten	85.706	654	123.151	28.445
17	Bali	72.104	591	180.488	40.495
18	NTB	19.542	262	72.661	16.914
19	NTT	64.222	713	66.786	15.113
20	Kalimantan Barat	42.934	665	68.500	14.589
21	Kalimantan Tengah	41.406	385	53.990	13.224
22	Kalimantan Selatan	67.004	561	101.994	27.899
23	Kalimantan Timur	56.454	405	82.713	21.603
24	Sulawesi Utara	30.482	223	90.240	21.295
25	Sulawesi Tengah	36.042	258	84.097	18.513
26	Sulawesi Selatan	206.162	1.683	339.944	74.214
27	Sulawesi Tenggara	25.086	275	55.761	11.529
28	Gorontalo	24.456	185	42.264	10.463
29	Sulawesi Barat	30.579	284	48.709	9.871
30	Maluku	30.778	319	26.608	5.957
31	Maluku Utara	10.535	89	11.238	2.292
32	Irian Jaya Barat	30.603	122	16.308	3.520
33	Papua	58.000	374	36.346	8.083
	<b>TOTAL</b>	<b>2.908.283</b>	<b>25.934</b>	<b>6.293.674</b>	<b>1.590.039</b>

### 3.7.3 Pelaksanaan KUR di Bank Mandiri

Tata cara pengajuan KUR di Bank Mandiri

Skema kredit untuk tujuan produktif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengalaman usaha
2. Memiliki legalitas usaha/NPWP

3. Berdasarkan trade cheking tidak ada informasi negatif mengenai perusahaan/pengurus pemilik dan tidak sedang menghadapi/terlibat masalah hukum
4. Jaminan berupa fixed asset (untuk kredit investasi jaminannya adalah proyek yang dibiayai). Sedangkan untuk kredit modal kerja jaminannya maksimum 30%.
5. Memiliki kemampuan membayar dari usaha yang dibiayai.
6. Berdasarkan SID Bank Indonesia, perusahaan/pengurus/pemilik tidak memiliki kredit macet dan tidak masuk Daftar Hitam.

Prosedur untuk pengajuan kredit untuk tujuan usaha produktif tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Calon debitur mendatangi Kantor Cabang Bank Mandiri dengan melengkapi persyaratan administrasi.
2. Bank Mandiri akan melakukan analisa terhadap kelayakan usaha Calon Debitur.
3. Calon debitur yang layak untuk dibiayai tetapi agunan tidak mencukupi tetap dapat diberikan kredit melalui Penjaminan Kredit dari Lembaga Penjaminan.
  - a. Sebaran KUR menurut Sektor ekonomi

Bank Mandiri merupakan bank terbesar ke tiga dalam menyalurkan KUR tahun 2008, di bawah BRI dan BNI. Realisasi KUR Mandiri sebesar Rp.1,142 triliun atau 9,05% dari KUR Nasional.

Berbeda dengan BRI dan BNI yang dominan menyalurkan KUR untuk sektor perdagangan, Bank Mandiri realisasi KUR terbesar adalah untuk sektor pertanian. Dimana 62,86% KUR Bank Mandiri adalah untuk sektor pertanian dengan rata-rata kredit per debitur di sektor pertanian sebesar Rp. 20,34 juta. Sektor perdagangan menyerap KUR Mandiri sebesar 29,98%, dan sektor terendah penyerapan KUR Bank Mandiri adalah untuk sektor pertambangan sebesar 0,10%.

**Tabel 3.16 Sebaran KUR Bank Mandiri Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2008.**

NO	SEKTOR EKONOMI	BANK MANDIRI		
		Total Kredit (Rp Juta)	Total Debitur	Persentase KUR Sektor thd KUR Mandiri
1	Pertanian	718.239	35.315	62,86
2	Pertambangan	1.100	5	0,10
3	Industri Pengolahan	24.292	95	2,13
4	Listrik, Gas & Air	-	-	
5	Konstruksi	13.823	43	1,21
6	Perdagangan, Restoran & Hotel	342.614	1.338	29,98
7	Perumahan	-	-	
8	Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi	10.767	88	0,94
9	Jasa-jasa Dunia Usaha	7.435	28	0,65
10	Jasa-jasa Sosial/ Masyarakat	9.578	38	0,84
11	Lain-lain	14.835	60	1,30
	Total	1.142.681	37.010	

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

**b. Sebaran KUR menurut Provinsi**

Realisasi KUR di Bank Mandiri tahun 2008, lebih tersebar di luar Pulau Jawa. Penyerapan KUR Mandiri terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.223,03 miliar atau 19,52% dari total KUR Mandiri, diikuti Kalimantan Barat dengan serapan KUR sebesar Rp.171 miliar atau 14,99%. Provinsi lain dengan penyerapan KUR yang cukup tinggi di luar Jawa adalah adalah Riau (7,02%), Lampung (6,42%), Kalimantan Timur (4,30%) dan Sumatera Utara (4,20%). Sementara di Pulau Jawa serapan KUR Mandiri terbesar di Jawa Timur sebesar 13,67% dan Jawa Tengah (6,50%).



**Tabel 3.17 Sebaran KUR Bank Mandiri Menurut Provinsi, Tahun 2008.**

NO	PROVINSI	BANK MANDIRI		
		Total Kredit (Rp Juta)	Total Debitur	Persentase KUR Provinsi thd KUR Mandiri
1	Nangroe Aceh Darussalam	920	5	0,08
2	Sumatera Utara	48.040	353	4,20
3	Sumatera Barat	25.896	152	2,27
4	Riau	80.170	1.189	7,02
5	Jambi	5.434	56	0,48
6	Sumatera Selatan	31.208	126	2,73
7	Bengkulu	10.551	47	0,92
8	Lampung	73.358	7.606	6,42
9	Kepulauan Riau	11.182	63	0,98
10	Bangka Belitung	8.936	38	0,78
11	DKI Jakarta	11.705	30	1,02
12	Jawa Barat	37.370	169	3,27
13	Jawa Tengah	74.321	9.641	6,50
14	D.I. Yogyakarta	7.150	17	0,63
15	Jawa Timur	156.225	5.692	13,67
16	Banten	5.683	21	0,50
17	Bali	8.075	28	0,71
18	NTB	350	1	0,03
19	NTT	3.199	10	0,28
20	Kalimantan Barat	171.293	6.221	14,99
21	Kalimantan Tengah	223.032	3.568	19,52
22	Kalimantan Selatan	4.837	19	0,42
23	Kalimantan Timur	49.162	1.585	4,30
24	Sulawesi Utara	15.615	66	1,37
25	Sulawesi Tengah	10.320	43	0,90
26	Sulawesi Selatan	38.537	135	3,37
27	Sulawesi Tenggara	7.828	40	0,69
28	Gorontalo	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-
30	Maluku	2.120	10	0,19
31	Maluku Utara	870	4	0,08
32	Irian Jaya Barat	8.070	31	0,71
33	Papua	11.225	44	0,98
	TOTAL	1.142.681	37.010	

#### 3.7.4 Pelaksanaan KUR di Bank BTN

##### Pelaksanaan KUR di Bank BTN

1. Usaha yang dibiayai adalah usaha produktif sektor perindustrian, perdagangan, dan jasa, kredit konstruksi perumahan.

2. Media penyaluran KUR, memanfaatkan kredit eksisting BTN yaitu: Kredit Yasa Griya (modal kerja konstruksi), Kredit Pendukung Perumahan, Kredit Modal Kerja, Kredit Modal Kerja Kontraktor, Kredit Investasi, Kredit Pemilikan Ruko/Kios dan lainnya.
3. Platfon kredit:
  - a. Maksimal kredit sebesar Rp.500 juta
  - b. Kredit investasi sebesar maksimal 70% dari total biaya investasi.
  - c. Kredit modal kerja sebesar maksimal 80% dari kredit modal kerja yang dibutuhkan.
4. Persyaratan mengajukan kredit:
  - Debitur perorangan mengajukan surat permohonan KUR dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - KTP dan Kartu Keluarga (KK)
    - Surat nikah apabila telah menikah
    - Perizinan usaha (surat izin dari dinas pasar bila usaha di pasar, atau surat keterangan RT/RW untuk lokasi di lingkungan pemukiman.
    - Legalitas tempat usaha, bila ada misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya.
    - Rincian peruntukan kredit.
    - Agunan, jika ada disyaratkan bank
  - Untuk usaha kecil dan menengah (Badan Usaha) mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - Akte pendirian perusahaan sampai dengan perubahan terakhir.
    - Nomor Pokok Wajib Pajak
    - SIUP, TDP, dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi kriteria perjanjian usaha mikro.
    - Legalitas tempat usaha, bila ada misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa atau lainnya.
    - Laporan keuangan terakhir/minimal catatan keuangan usaha sebagaimana persyaratan untuk perorangan.

- Rincian peruntukan kredit
- Agunan, jika ada disyaratkan bank.

a. Sebaran KUR menurut Sektor ekonomi

Bank BTN selama ini merupakan bank yang fokus kepada sektor perumahan. Keikutsertaan Bank BTN pada program KUR diharapkan lebih untuk sebaran KUR di sektor konstruksi. Tahun 2008, sebaran KUR Bank BTN tidak terlalu bervariasi dan hanya terkonsentrasi pada dua sektor yaitu sektor konstruksi dengan serapan KUR sebesar Rp.54 miliar atau 32,83% dari total KUR Bank BTN, dan sektor lain-lain dengan serapan KUR sebesar 60,29%. Sepanjang tahun 2008, realisasi KUR BTN merupakan yang terendah di antara bank pelaksana KUR yaitu sebesar Rp. 166,04 miliar atau 1,31% dari total KUR nasional.

**Tabel. 3.18 Sebaran KUR Bank BTN Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2008.**

NO	SEKTOR EKONOMI	BTN		
		Total Kredit (Rp Juta)	Total Debitur	Persentase KUR Sektor thd KUR BTN
1	Pertanian	-	-	-
2	Pertambangan	-	-	-
3	Industri Pengolahan	712	6	0,43
4	Listrik, Gas & Air	-	-	-
5	Konstruksi	54.520	377	32,83
6	Perdagangan, Restoran & Hotel	5.25	90	3,45
7	Perumahan	-	-	-
8	Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi	768	2	0,46
9	Jasa-jasa Dunia Usaha	2.846	42	1,71
10	Jasa-jasa Sosial/ Masyarakat	1.360	7	0,82
11	Lain-lain	100.113	512	60,29
	Total	166.044		

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

b. Sebaran KUR Menurut Provinsi

Berdasarkan wilayah sebaran, realisasi KUR BTN sebagian besar adalah di Pulau Jawa, dengan realisasi terbesar di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah KUR sebesar Rp. 38,7 miliar atau 23,34 % dari total KUR BTN, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa

Barat dengan porsi KUR BTN sebesar 12,89% dan 11,59%. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa tidak terdapat kredit KUR BTN seperti di Provinsi Irian Jaya Barat dan Sulawesi Barat. Hal ini terjadi karena belum adanya kantor perwakilan/cabang bank BTN di daerah tersebut.

**Tabel.3.19 Sebaran KUR Bank BTN Menurut Provinsi, Tahun 2008**

NO	PROVINSI	BTN		
		Total Kredit (Rp Juta)	Total Debitur	Persentase KUR Provinsi thd KUR BTN
1	Nangroe Aceh Darussalam	1.250	3	0,75
2	Sumatera Utara	2.080	11	1,25
3	Sumatera Barat	6.233	54	3,75
4	Riau	1.119	10	0,67
5	Jambi	270	2	0,16
6	Sumatera Selatan	1.115	4	0,67
7	Bengkulu	5.510	17	3,32
8	Lampung	3.070	9	1,85
9	Kepulauan Riau	3.140	12	1,89
10	Bangka Belitung	430	7	0,26
11	DKI Jakarta	38.759	167	23,34
12	Jawa Barat	19.250	170	11,59
13	Jawa Tengah	13.942	125	8,40
14	D.I. Yogyakarta	2.262	16	1,36
15	Jawa Timur	21.402	95	12,89
16	Banten	8.158	44	4,91
17	Bali	1.877	52	1,13
18	NTB	2.261	9	1,36
19	NTT	290	6	0,17
20	Kalimantan Barat	1.110	11	0,67
21	Kalimantan Tengah	2.360	9	1,42
22	Kalimantan Selatan	1.297	16	0,78
23	Kalimantan Timur	6.271	75	3,78
24	Sulawesi Utara	6.884	20	4,15
25	Sulawesi Tengah	524	6	0,32
26	Sulawesi Selatan	1.619	11	0,98
27	Sulawesi Tenggara	2.365	22	1,42
28	Gorontalo	3.817	16	2,30
29	Sulawesi Barat	-	-	-
30	Maluku	4.897	17	2,95
31	Maluku Utara	999	13	0,60
32	Irian Jaya Barat	-	-	-
33	Papua	1.485	7	0,89
	<b>TOTAL</b>	<b>166.044</b>	<b>1.036</b>	<b>0,75</b>

### 3.7.5 Pelaksanaan KUR di Bank Bukopin

#### 1. Kriteria penerima kredit

- Usaha Mikro (pengrajin, nelayan, petani, dan pedagang) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Menjalankan usaha produktif yang layak
  - Mempunyai fotocopy KTP/KK
  - Mempunyai tempat usaha milik sendiri atau sewa dan sejenisnya
  - Usaha telah dilakukan lebih dari 2 tahun
  - Mempunyai pembukuan atau catatan usaha, kecuali untuk budidaya di sektor pertanian, kelautan, perdagangan, perindustrian, atau perkebunan.
  - Mempunyai atau dapat menyerap tenaga kerja
- Usaha kecil dalam pengertian ini adalah pelaku usaha di sektor pertanian, kelautan, perdagangan, perindustrian, jasa atau perkebunan, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Menjalankan usaha produktif yang layak
  - Menyerahkan foto copy KTP atau KK
  - Bentuk usaha dapat berupa: perseorangan, CV atau FA, atau badan hukum Perseroaan Terbatas atau Koperasi.
  - Akta pendirian badan usaha
  - Mempunyai tempat usaha milik sendiri atau di sewa
  - Usaha telah dilakukan lebih dari dua tahun
  - Mempunyai pembukuan atau catatan keuangan sederhana
  - Mempunyai surat legalitas usaha, seperti NPWP, SIUP, TDP dan perijinan/legalitas lainnya.
  - Mempunyai atau menyerap tenaga kerja
  - Tidak sedang menikmati kredit/pembiayaan sejenis dari bank yang dibuktikan dengan BI *Cheking*.

#### 2. Kriteria penyaluran kredit

- Kredit/pembiayaan baru

- Kredit/pembiayaan perpanjangan yang masih dalam keadaan lancar (kolektibilitas satu) sesuai ketentuan Bank Indonesia dan belum pernah direstrukturisasi atau
  - Kredit/pembiayaan tambahan yang masih dalam keadaan lancar (kolektibilitas 1) sesuai ketentuan Bank Indonesia dan belum pernah di restrukturisasi.
  - Kredit/pembiayaan bukan hasil take over dari bank lain yang dibuktikan dengan BI Cheking.
  - Penggunaan kredit adalah untuk modal kerja atau investasi yang mendukung sektor ekonomi produktif dan layak untuk dibiayai.
  - Struktur kredit/pembiayaan
    - Untuk usaha mikro, platfon kredit/pembiayaan yang dapat diberikan adalah di atas 50 juta sampai dengan Rp. 100 juta.
    - Untuk usaha kecil, platfon kredit/pembiayaan yang dapat diberikan adalah lebih dari Rp.100 juta sampai dengan Rp.250 juta.
    - Kredit usaha menengah dan koperasi, platfon kredit/pembiayaan yang dapaat diberikan adalah lebih dari Rp.250 juta sampai dengan Rp. 500 juta
  - Analisa kelayakan  
Menggunakan internal credit risk rating (ICRR) yaitu suatu alat untuk melakukan analisa kelayakan, mengidentifikasi dan mengukur risiko atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank.
  - Penggunaan kredit untuk modal kerja atau untuk investasi dan atau modal kerja.
- a. Sebaran KUR menurut Sektor ekonomi
- Sebaran KUR di Bank Bukopin menurut sektor ekonomi, terbesar adalah di sektor perdagangan. Dari total KUR Bukopin sebesar Rp.623,20 miliar, sebesar Rp. 280 miliar atau 45,01% di serap oleh sektor perdagangan. Sementara sektor yang lain yang menonjol menyerap KUR Bukopin adalah sektor jasa dunia usaha dengan porsi KUR mencapai 21,71% dan sektor konstruksi dengan serapan KUR sebesar 14,87%.

**Tabel. 3.20. Sebaran KUR Bank Bukopin Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2008.**

NO	SEKTOR EKONOMI	Total Kredit (Rp Juta)	Total Debitur	Persentase KUR Sektor thd KUR Bukopin
1	Pertanian	64.897	702	10,41
2	Pertambangan	550	2	0,09
3	Industri Pengolahan	30.614	95	4,91
4	Listrik, Gas & Air	150	1	0,02
5	Konstruksi	92.669	221	14,87
6	Perdagangan, Restoran & Hotel	280.476	820	45,01
7	Perumahan	-	-	-
8	Pengangkutan dan Komunikasi	10.215	29	1,64
9	Jasa-jasa Dunia Usaha	135.270	925	21,71
10	Jasa-jasa Sosial/ Masyarakat	7.565	147	1,21
11	Lain-lain	800	2	0,13
	Total	623.205	2.944	

b. Sebaran KUR menurut Provinsi

Penyaluran KUR oleh Bank Bukopin belum menjangkau semua provinsi di Indonesia, dari 33 provinsi hanya 22 provinsi yang memperoleh KUR dari Bank Bukopin. Sementara 11 provinsi lainnya tidak memperoleh layanan KUR dari Bank Bukopin, hal ini terjadi karena belum adanya kantor cabang bank bukopin di daerah-daerah tersebut. Berdasarkan realisasi KUR Bukopin tahun 2008, serapan KUR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu tertinggi di DKI Jakarta yang menyerap 17,77% KUR Bukopin, diikuti Jawa Timur dan Jawa Barat masing-masing 16,23% dan 15,63%. Sementara daerah di luar pulau Jawa yang menyerap KUR Bokopin tertinggi hanya di Sumatera Utara sebesar 7,94% sedangkan daerah-daerah lainnya serapan KUR Bukopin relatif kecil.

**Tabel.3.21 Sebaran KUR Bank Bukopin Menurut Provinsi, Tahun 2008.**

NO	PROVINSI	Total Kredit (Rp Juta)	Total Debitur	Persentase KUR Provinsi thd KUR Bukopin
1	Nangroe Aceh Darussalam	4.582	15	0,74
2	Sumatera Utara	49.495	638	7,94
3	Sumatera Barat	7.946	34	1,28
4	Riau	10.387	49	1,67
5	Jambi	2.390	8	0,38
6	Sumatera Selatan	32.397	74	5,20
7	Bengkulu	-	-	-
8	Lampung	12.176	153	1,95
9	Kepulauan Riau	25.794	70	4,14
10	Bangka Belitung	-	-	-
11	DKI Jakarta	110.735	521	17,77
12	Jawa Barat	97.397	315	15,63
13	Jawa Tengah	59.915	442	9,61
14	D.I. Yogyakarta	3.649	15	0,59
15	Jawa Timur	101.169	296	16,23
16	Banten	15.705	46	2,52
17	Bali	3.420	15	0,55
18	NTB	6.978	26	1,12
19	NTT	5.750	16	0,92
20	Kalimantan Barat	13.235	36	2,12
21	Kalimantan Tengah	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	7.525	31	1,21
23	Kalimantan Timur	22.375	61	3,59
24	Sulawesi Utara	13.494	33	2,17
25	Sulawesi Tengah	-	-	-
26	Sulawesi Selatan	16.693	50	2,68
27	Sulawesi Tenggara	-	-	-
28	Gorontalo	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-
30	Maluku	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-
32	Irian Jaya Barat	-	-	-
33	Papua	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>623.205</b>	<b>2.944</b>	

### 3.7.6 KUR Bank Syariah Mandiri

Ketentuan dan tata cara pengajuan KUR di Bank Syariah Mandiri

1. Program Barakah diberikan kepada perorangan, Badan Usaha di semua sektor industri, untuk keperluan produktif dengan lamanya usaha minimal 2 (dua) tahun menurut penilaian bank dapat dibiayai dengan kondisi:



- Mempunyai potensi usaha dan atau komoditas yang diusahakan telah mempunyai pasar.
  - Mempunyai prospek usaha yang layak dan mampu menyerap tenaga kerja
  - Mempunyai legalitas dan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku
  - Usaha tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan pembiayaan yang berlaku serta dinyatakan layak oleh BSM.
  - Tidak termasuk dalam daftar kredit macet atau kredit bermasalah
  - Mengusulkan proposal pinjaman/kredit sesuai dengan kebutuhan usaha.
2. Persyaratan pembiayaan
- Kebutuhan UMKM yang dibiayai adalah investasi dan/atau modal kerja layak untuk dibiayai berdasarkan azas pembiayaan yang sehat dan tidak sedang dibiayai fasilitas pembiayaan bank lainnya.
  - Pembiayaan dapat disalurkan langsung ke nasabah atau melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
  - Maksimum pembiayaan adalah Rp. 500 juta.
  - Jangka waktu pembiayaan untuk modal kerja tiga tahun, apabila diperlukan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BSM, dan untuk pembiayaan investasi jangka waktu lima tahun sesuai dengan analisa kelayakan serta ketentuan pembiayaan yang berlaku pada BSM.
  - Margin/bagi hasil pembiayaan setinggi-tingginya setara dengan 16% efektif per tahun.
  - Pengajuan kredit dilakukan di Kantor Cabang/Cabang pembantu.
- a. Sebaran KUR menurut Sektor ekonomi
- Bank Syariah Mandiri (BSM) sepanjang tahun 2008, cukup fokus untuk menyalurkan KUR untuk sektor pertanian. Hal ini terlihat dari besarnya porsi KUR BSM untuk sektor pertanian yang mencapai 38,82%, diikuti sektor lainnya, dan sektor perdagangan.

**Tabel. 3.22. Sebaran KUR BSM Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2008.**

NO	SEKTOR EKONOMI	BANK SYARIAH MANDIRI		
		Total Kredit (Rp Juta)	Total Debitur	Persentase KUR Sektor thd KUR BSM
1	Pertanian	26.717	1.239	38,82
2	Pertambangan	2.377	6	0,73
3	Industri Pengolahan	8.785	52	2,69
4	Listrik, Gas & Air	958	6	0,29
5	Konstruksi	17.034	71	5,22
6	Perdagangan, Restoran & Hotel	84.717	485	25,95
7	Perumahan	-	-	-
8	Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi	5.235	40	1,60
9	Jasa-jasa Dunia Usaha	60.055	3.583	18,40
10	Jasa-jasa Sosial/ Masyarakat	20.558	225	6,30
11	Lain-lain	-	-	38,82
	Total	326.436	5.707	

b. Sebaran KUR menurut Provinsi

Sebaran KUR di Bank Syariah Mandiri (BSM) terbesar di Pulau Sumatera, terutama untuk kredit di sektor pertanian khususnya perkebunan. Secara nasional realisasi KUR BSM tahun 2008 tertinggi di Sumatera Utara dan Riau dengan porsi KUR masing-masing sebesar 22,42% dan 18,81%. Secara keseluruhan realisasi KUR Bank BSM di Pulau Sumatera sebesar 61,45%. Keterbatasan kantor cabang BSM yang belum ada di setiap daerah, menyebabkan sejumlah daerah belum terlayani oleh KUR BSM, terutama untuk daerah kawasan timur Indonesia.

**Tabel 3.23 Sebaran KUR Bank Syariah Mandiri Menurut Provinsi, Tahun 2008.**

NO	PROVINSI	BANK SYARIAH MANDIRI		
		Total Kredit (Rp Juta)	Total Debitur	Persentase KUR Provinsi thd KUR BSM
1	Nangroe Aceh Darussalam	18.648	529	5,71
2	Sumatera Utara	73.199	398	22,42
3	Sumatera Barat	7.955	58	2,44
4	Riau	61.417	321	18,81
5	Jambi	2.870	12	0,88
6	Sumatera Selatan	20.132	190	6,17
7	Bengkulu	3.334	78	1,02
8	Lampung	7.493	163	2,30
9	Kepulauan Riau	5.708	42	1,75
10	Bangka Belitung	-	-	-
11	DKI Jakarta	11.901	175	3,65
12	Jawa Barat	28.347	346	8,68
13	Jawa Tengah	25.857	1.945	7,92
14	D.I. Yogyakarta	6.490	507	1,99
15	Jawa Timur	9.582	515	2,94
16	Banten	3.418	17	1,05
17	Bali	255	2	0,08
18	NTB	1.931	204	0,59
19	NTT	-	-	-
20	Kalimantan Barat	11.102	46	3,40
21	Kalimantan Tengah	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	1.550	5	0,47
23	Kalimantan Timur	3.014	16	0,92
24	Sulawesi Utara	3.470	22	1,06
25	Sulawesi Tengah	2.209	36	0,68
26	Sulawesi Selatan	6.895	34	2,11
27	Sulawesi Tenggara	-	-	-
28	Gorontalo	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-
30	Maluku	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-
32	Irian Jaya Barat	-	-	-
33	Papua	9.661	46	2,96
	<b>TOTAL</b>	<b>326.436</b>	<b>5.707</b>	

### 3.8 Pelaksanaan KUR pada Lembaga Penjamin Kredit

Dua lembaga penjaminan kredit yang turut serta pada Program Kredit Usaha Rakyat adalah PT.Askrindo dan Perum Jamkrindo, yang merupakan perusahaan milik negara.

### 3.8.1 Penjaminan KUR pada PT.Askrindo

Satu tahun pelaksanaan KUR sampai dengan Bulan Desember 2008 besarnya jumlah kredit KUR yang dijamin oleh enam bank pelaksana kepada PT.Askrindo sebesar Rp.8,5 triliun. Dari jumlah tersebut, pada akhir tahun 2008 tercatat sebanyak Rp.5,17 miliar tunggakan/kredit macet atau 0,06% dari total kredit. Sesuai dengan ketentuan MoU KUR, maka dari jumlah tunggakan tersebut, porsi yang harus ditanggung oleh PT.Askrindo adalah sebesar 70% dari tunggakan atau Rp. 3,620 miliar. Sementara jumlah klaim yang telah di bayarkan oleh PT.Askrindo adalah sebesar Rp. 2,215 miliar.

**Tabel. 3.24 Penjaminan KUR di PT.Askrindo s.d Bulan Desember 2008**

Bank	KUR Yang Dijamin			Klaim Yang Diajukan			Klaim Yang Dibayar	
	Jumlah Debitur	Plafond KUR (Rp miliar)	Porsi Lembaga Penjamin (Rp miliar)	Jumlah Debitur	Jumlah Tunggakan (Rp.juta)	Porsi Lembaga Penjamin (Rp.juta)	Jumlah Debitur	Jumlah Klaim (Rp. Juta)
BRI	1.130.294	6.903,77	4.832,64	234	4.597,74,	3.218,42	80	1.812,94
Mandiri	1.064	263,46	184,42	-	-	-	-	-
BNI	6.575	756,43	529,50	2	575,00	402,50	2	402,50
BTN	588	110,15	77,11	-	-	-	-	-
Bukopin	1.779	466,00	326,28	-	-	-	-	-
BSM	104	28,04	19,62	-	-	-	-	-
Total	1.140.404	8.528,00	5.969,60	236	5.172,74	3.620,92	82	2.215,44

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Memasuki tahun 2009, seiring dengan peningkatan jumlah KUR yang disalurkan jumlah kredit KUR yang dijamin kepada PT.Askrindo hingga bulan April 2009 sebesar Rp.10,64 triliun. Besarnya tunggakan kredit sebesar Rp. 33,994 miliar atau 0,31% dari total kredit. Sehingga jumlah porsi tunggakan yang menjadi kewajiban PT.Askrindo adalah sebesar Rp.23,79 miliar. Semenatar besarnya klaim yang telah dibayarkan sampai dengan April 2009 sebesar Rp.11,137 miliar.

**Tabel.3.25 Penjaminan KUR di PT.Askrindo s.d Bulan April 2008**

Bank	KUR yang Dijamin			Klaim Yang Diajukan			Klaim Yang Dibayar	
	Jumlah Debitur	Plafond KUR (Rp.miliar)	Porsi Lembaga Penjamin (Rp miliar)	Jumlah Debitur	Jumlah Tunggakan (Rp.juta)	Porsi Lembaga Penjamin (Rp.juta)	Jumlah Debitur	Jumlah Klaim (Rp. juta)
BRI	1.522.054	8.835,45	6.184,81	5.881	5,085,50	3,531,23	1.826	3,332,74
Mandiri	1.279	312,82	218,97	1	1,350,47	1,097,11	1	1,055,25
BNI	7.146	814,50	570,15	1	500,00	269,25	3	269,25
BTN	861	158,74	111,12	-	300,00	190,69	-	190,69
Bukopin	1.859	490,64	384,45	5	-	-	1	-
BSM	114	30,69	21,48	1	200,00	174,00	-	121,80
Total	1.533.313	10.642,86	7.450,00	5.889	7,435,97	5,262,30	1.831	4,969,74

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

### 3.8.2 Penjaminan KUR pada Perum Jamkrindo

Jumlah penjaminan yang diajukan oleh Bank Pelaksana KUR kepada Perum Jamkrindo jauh lebih kecil dibandingkan dengan penjaminan yang diajukan kepada PT.Askrindo. Sampai dengan Bulan April 2009, jumlah kredit KUR yang dijaminan oleh bank pelaksana kepada Perum Jamkrindo sebesar Rp. 2,85 triliun. Besarnya tunggakan kredit sampai bulan April 2009 adalah Rp. 7,43 miliar, sehingga porsi klaim oleh lembaga penjaminan adalah sebesar 70% dari tunggakan atau Rp. 5,26 miliar. Sementara jumlah klaim asuransi yang telah dibayarkan sampai dengan Bulan April 2009 berjumlah Rp. 4,96 miliar.

**Tabel. 3.26 Penjaminan KUR di Perum Jamkrindo s.d Bulan April 2009**

Bank	KUR yang Dijamin			Klaim Yang Diajukan			Klaim Yang Dibayar	
	Jumlah Debitur	Plafond KUR (Rp miliar)	Porsi Lembaga Penjamin (Rp miliar)	Jumlah Debitur	Jumlah Tunggakan (Rp.juta)	Porsi Lembaga Penjamin (Rp.juta)	Jumlah Debitur	Jumlah Klaim (Rp. Juta)
BRI	194.666	1.223,32	856,32	635	3.531,23	2.471,86	558	3.332,74
Mandiri	14.877	781,59	547,11	5	1.097,11	767,97	5	1.055,25
BNI	3.150	270,77	89,54	1	269,25	188,48	1	269,25
BTN	357	117,83	82,48	1	190,69	133,48	1	190,69
Bukopin	466	53,35	37,35	-	-	0	-	-
BSM	2.441	408,90	286,23	1	174,00	121,80	1	121,80
Total	215.957	2.855,79	1.999,05	643	5,262,30	3.683,61	566	4.969,74

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian